

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengembangkanteori yang digunakan dalam menguji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam mengembangkan bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

Penelitian ini dilakukan oleh Madali (2016) memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa profesionalisme auditor, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor dan etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada akuntan publik. Kewajiban itu akan bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, pengalaman auditor dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode angket, yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan instrument yang berisi daftar pertanyaan responden. Hasil berbeda telah dilakukan pada penelitian Natalisa dan Tarigan (2017) variabel pengetahuan kekeliruan dan pengalaman auditor berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan dan pengalaman auditor memiliki pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi penelitian ini adalah auditor independen yang bekerja pada KAP yang berada di wilayah DKI Jakarta. Metode analisis data dan menggunakan regresi berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2015) menentukan hasil penelitian bahwa profesionalisme auditor, etika profesi, pengalaman auditor berpengaruh secara signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas. Populasi dalam penelitian ini adalah Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik se-Medan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *quota sampling*. Jenis penelitian adalah penelitian kausal komparatif. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Namun tidak sejalan dengan penelitian Utami (2014) yang menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh negatif dan signifikan pada pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor yang profesional tidak akan terlalu mudah dan murah dalam mengambil keputusan dalam memenuhi keinginan klien.

Selanjutnya penelitian ini dilakukan oleh Aprilia (2017) yang menunjukkan bahwa profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, etika profesi, dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekeliruan, etika profesi dan akuntabilitas terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Objek penelitian ini adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Aceh, Medan dan Palembang. Ada delapan puluh kuesioner yang dikirim, tetapi hanya empat puluh dua kuesioner dikembalikan. Data analisis ini metode regresi berganda dan program SPSS versi 19. Penelitian berdasarkan Marito (2014) bahwa hubungan Skeptisme Profesional Auditor, Situasi Audit, Etika Profesi, Pengalaman Audit, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas. Disimpulkan bahwa variabel skeptisisme profesionalisme, situasi audit dan etika profesi hubungan negatif signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas, sementara pengalaman audit dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hasil penelitian lain dilakukan oleh Idawati dan Eveline (2016) menentukan bahwa proses audit akan menghasilkan pengaruh independensi, kompetensi dan profesionalisme auditor berpengaruh positif pada pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Tujuan penelitian menunjukkan pengaruh independensi, kompetensi dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis kausalitas komparatif dengan menggunakan data primer yang dapat digunakan melalui kuesioner. Sampel penelitian berlokasi pada KAP Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dengan menggunakan teknik sampling *simple random sampling*. Analisis yang digunakan regresi berganda. Namun tidak sejalan dengan penelitian lain Utami (2014), yang menunjukkan bahwa etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, karena semakin rendah etika profesi pada seorang auditor maka semakin rendah kinerja audit yang dilakukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan

Penelitian lain juga serupa dibuat dalam jurnal internasional. Penelitian ini dilakukan oleh Brink (2015) bahwa penelitian ini akan berpengaruh signifikan pada ciri-ciri kepribadian, posisi etis dan materialitas secara individual dan bersama-sama terhadap keputusan pelaporan pelanggaran karyawan tingkat awal. Penelitian ini memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menganalisa tugas yang telah diberikan. Pengetahuan akuntansi dasar mencakup pemahaman materialitas masalah yang dilaporkan seperti disajikan dalam instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Data penelitian ini kuesioner yang terdiri dari empat puluh empat pernyataan yang mewakili lima skala kepribadian : delapan pernyataan yang mengukur *extraversion*, sembilan pernyataan yang mengukur kesesuaian, sembilan pernyataan yang mengukur kesungguhan, delapan pernyataan yang mengukur neurotisme, dan sepuluh pernyataan yang mengukur keterbukaan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan skala Likert lima poin mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tebayeva, (2015) dengan menentukan hasil bahwa penelitian secara umum materialitas audit berpengaruh signifikan pada prosedur audit dan risiko audit. Penelitian ini menggunakan data

keduanya yaitu kualitatif dan aspek kuantitatif karena pengaruh ganda dari kualitatif dan faktor kuantitatif untuk menentukan materialitas konsep yang diterapkan standar tunggal yang tak berguna. Selain itu, konsep materialitas pasti subyektivitas yang cukup besar, salah satu auditor menganggap penting untuk menilai yang tidak signifikan. Analisis data yang digunakan menerapkan sampling atau prosedur analitik untuk mengurangi risiko audit secara keseluruhan ketinggian yang dapat diterima.

Penelitian internasional yang selanjutnya dilakukan oleh Baldauf (2015) menunjukkan bahwa hasil studi memberikan bukti standardisasi dan implementasi pedoman materialitas kuantitatif menghasilkan penilaian materialitas perencanaan yang lebih kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh risiko audit dan pedoman kuantitatif terhadap penilaian materialitas perencanaan dan penyesuaian salah saji material. Untuk menguji hipotesis dua sisi, kami menggunakan studi kasus dan melakukan eksperimen untuk mempelajari penilaian materialitas auditor.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Kharismatuti (2012) teori keagenan (*Agency Theory*) , mengungkapkan adanya hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan atau pihak yang memberi mandat) dan agen (manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat) yang dilandasi dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung risiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi.

Teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami permasalahan yang terjadi dapat menghilangkan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan yang dibuat pihak manajemen sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi kerja yang dapat menghasilkan sebuah informasi yang relevan bagi seluruh pengguna laporan keuangan tersebut.

Teori tersebut menjadi dasar dalam penelitian ini yakni, pengaruh profesionalisme, etika profesi, dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas menyatakan diberlakukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi bahwa kebutuhan akan kepercayaan masyarakat publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, terlepas dari suatu permasalahan.

2.2.2 Profesionalisme

Pengertian profesionalisme menurut Ardianingsih (2018 : 31) adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu, dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Profesional bertanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Auditor sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut.

Profesionalisme merupakan syarat utama bagi seorang auditor untuk melayani kepentingan publik dengan memiliki sikap profesionalisme yang tinggi maka hasil audit akan lebih dipercaya (Marbun, 2015). Sebagai seorang yang profesional auditor merencanakan dan melakukan tugasnya dengan penuh kecermatan dalam berprofesi dan keterampilan serta kepedulian yang akan diharapkan pada akuntan profesional.

Akuntan publik mengakui tanggungjawabnya terhadap masyarakat, terhadap rekan seprofesi termasuk untuk berperilaku yang hormat, sekalipun itu pengorbanan pribadi. (Messier,*et.al*, 2014:53). Menurut Arens, *et.al* (2015:96) menyatakan bahwa profesionalisme adalah suatu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu merupakan pengorbanan diri.

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2011) seksi 150.1 menyatakan prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

Lesmana dan Machdar (2015) profesionalisme merupakan konsep untuk mengukur bagaimana profesional memandang profesi mereka yang tercermin melalui sikap dan perilaku mereka sebagai seorang auditor. Kewajiban seorang auditor dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan kesungguhan dan kecermatan berdasarkan standar profesinya, pendidikan dan keahliannya yang memiliki tanggung jawab sehingga mempunyai mutu atau kualitas yang dihasilkan dari pekerjaannya itu sendiri (Ramadhan, dkk 2018).

Menurut Agoes (2013 : 122) profesionalisme adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi, pemikiran gairah untuk terus menerus secara dewasa, secara intelek meningkatkan kualitas profesi mereka untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Jasmadeti, dkk (2018) profesionalisme memiliki arti bahwa sikap dan tingkah laku serta kemampuan dapat menunjukkan suatu profesi. Karakteristik profesional adanya dedikasi untuk melayani kepentingan publik yaitu :

1. Mencintai profesinya dan mengabdikan pada nilai-nilai profesi,
2. Dapat memberikan yang terbaik dan melaksanakan pekerjaannya secara totalitas, dan
3. Memiliki sikap untuk melayani dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan dan memiliki keahlian untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang profesinya terampil berdasarkan pengetahuan teoritis.

Menurut Hall R dalam Nasution (2015) terdapat lima indikator profesionalisme, yaitu :

1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan. Sikap dari pencurahan diri terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Jadi, pengabdian pada profesi memiliki indikator pada penyerahan diri terhadap pekerjaan dan menjalankan setiap program atas kegiatan profesinya.

2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Dari pernyataan diatas kewajiban sosial memiliki sebuah indikator. Indikator tersebut adalah integritas dan objektivitas. Bahwa seorang profesional harus mampu meningkatkan suatu kepercayaan masyarakat dan mampu berperan sebagai pihak netral.

3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintahan, klien dan bukan anggota profesi). Indikator tersebut adalah cara pengambilan keputusan.

4. Keyakinan terhadap profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Indikator tersebut mengacu kepada peraturan profesinya.

5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informasi sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional dengan pernyataan tersebut indikator hubungan dengan sesama profesi adalah dapat berinteraksi dengan sesama profesi.

2.2.3 Etika Profesi

Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai. Dengan kata lain, etika merupakan ilmu yang membahas dan mengkaji nilai dan norma. Para ahli filsafat, organisasi keagamaan, serta kelompok lainnya telah mendefinisikan serangkaian prinsip dan nilai moral ini dengan berbagai cara. Contoh serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditentukan adalah UU dan peraturan, kode etik bisnis bagi kelompok profesi seperti akuntan publik, serta kode perilaku dalam organisasi. (Arens.*et.al.*,2014:90)

Menurut Ardinarsih (2018:30) etika adalah refleksi kritis dan logis atas nilai dan norma-norma untuk pengendalian diri. Etika profesi dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Profesi itu beranggotakan para profesional yang merupakan kumpulan orang-orang berkeahlian dan kemahiran. Dalam memberikan jasa profesionalnya secara berkualitas maka para profesi dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat dan sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “*built-in mechanism*” berupa kode etik profesi. Dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi.

Keahlian yang dimiliki oleh manusia akan memberikan jasa dan pengetahuan yang seharusnya mempunyai rasa tanggung jawab kepada pihak yang akan dipengaruhi oleh jasanya. Pedoman dari Kode Etik Profesi Akuntan Publik bagi setiap anggota yaitu menjalankan tugas Institut Akuntan Publik Indonesia dengan memiliki tanggungjawab dan selalu objektif. (Agoes,2018:69)

Etika mengacu pada sistem atau kode perilaku yang didasarkan pada kewajiban moral dan kewajiban yang menunjukkan bagaimana kita harus bersikap. Profesionalisme mengacu pada perilaku, tujuan atau kualitas yang menjadi ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Semua profesi beroperasi di bawah beberapa jenis kode etik. Kode etik profesional berisi prinsip-prinsip, aturan perilaku dan interpretasi dari aturan perilaku (William, Steven dan Douglas, 2014:57).

Tugas yang seharusnya dijalankan sesuai dengan pedoman-pedoman Kode Etik Akuntan Indonesia dan aturannya maka akuntan tersebut dapat dikatakan profesional, dengan menjalankan tujuan aktivitas akuntan publik dapat memberikan keputusan yang akurat dan tepat dipertanggungjawabkan pada pihak-pihak keputusan. Auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya dan auditor dengan masyarakat, maka kode etik tersebut dapat membantu dan mengatur hubungan antara auditor dengan rekan sekerjanya (Rahayu, 2016:4).

Etika dapat diartikan sebagai refleksi kritis dan logis atas nilai dan norma-norma untuk pengendalian diri. Etika profesi dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri yang memiliki keahlian dan kemahiran. Menurut Pratiwi dan Nuryantoro (2015) menyatakan etika secara luas, umum dan sempit yang berarti bahwa etika digunakan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai yang dapat digunakan untuk masyarakat dalam menjalankan kehidupannya dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk bertindak, berbuat atau berperilaku untuk menilai apakah perbuatan yang dilakukan benar atau salah sesuai dengan etika yang dijalankan.

Etika dapat dipersempitkan dalam dua hal, yakni penilaian tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam perilaku manusia, dan sebuah cabang ilmu, tepatnya cabang filsafat, yakni pemikiran kefilosofatan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral. Etika memiliki arti penilaian tentang baik buruknya perilaku dan kajian terhadap kenyataan hidup dari segi baik buruk dan benar salahnya (Sihotang, 2016:57).

Menurut Arens, *et.al* (2014:91) berikut ini adalah enam nilai inti etis mengenai perilaku etis :

1. Dapat dipercaya (*trustworthiness*) mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas dan loyalitas. Kejujuran menurut itikad baik untuk mengemukakan kebenaran. Integritas berarti bahwa seorang bertindak sesuai dengan yang tinggi, dalam situasi apapun. Reliabilitas berarti melakukan semua usaha yang masuk akal untuk memenuhi komitmennya. Loyalitas adalah tanggung jawab untuk mengutamakan dan melindungi berbagai kepentingan masyarakat dan organisasi tertentu.
2. Penghargaan (*respect*) mencakup gagasan seperti kepantasan (*civility*), kesopansantunan (*courtesy*), kehormatan, toleransi dan penerimaan. Seseorang yang terhormat akan memperlakukan pihak lainnya dengan penuh pertimbangan dan menerima perbedaan serta keyakinan tanpa berprasangka buruk.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) berarti bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri. Pertanggung jawaban juga berarti berusaha sebaik mungkin dan memberi teladan dengan contoh, mencakup juga ketekunan serta upaya untuk terus melakukan perbaikan.
4. Kelayakan (*fairness*) dan keadilan mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan dan keseksamaan. Perlakuan yang layak berarti bahwa situasi yang serupa akan ditangani dengan cara yang konsisten
5. Perhatian (*caring*) berarti sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dalam mencakup tindakan yang memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan perbuatan baik.
6. Kewarganegaraan (*citizenship*) termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan dengan baik, antara lain pemungutan suara, bertindak sebagai juri pengadilan , dan melindungi sumber daya alam yang ada.

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2018:405), setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar Etika Profesi yang terdiri dari :

1. Prinsip Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*Undue Influence*) dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional (*Professional Competence and Due Care*)

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara kesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk kepentingan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari.

Menurut Agoes (2018:70) indikator etika profesi dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab yang dilakukan sebagai anggota profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesionalnya kedalam semua kegiatan yang dilakukannya. Anggota profesional mempunyai peranan penting dalam sebuah masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengukur dirinya sendiri.

2. Kepentingan Publik

Kepentingan publik yang dimiliki setiap anggota untuk senantiasa menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Ciri utama suatu profesi yaitu adanya penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang suatu peranan penting, dimana profesi akuntan terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan. Adapun pihak lainnya yang bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara fungsi bisnis secara tertib.

3. Integritas

Integritas adalah pengakuan profesional yang berdasarkan karakter. Integritas mengharuskan profesional untuk berterus terang tanpa mengharuskan rahasia penerima jasa, dan mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur. Tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi bagi para pelayanan dan kepercayaan publik. Integritas tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip, tetapi menerima kesalahan yang tidak sengaja dan perbedaan pendapat yang jujur.

4. Obyektivitas

Sebagai anggota profesi harus menjaga obyektivitasnya yang terbebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalisme dengan kehati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan yang dapat mendefinisikan sifat-sifat dan kewajiban kerahasiaan serta berbagai informasi yang telah diperoleh selama melakukan jasa profesional yang perlu diungkapkan.

7. Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku profesional dengan mendiskreditkan profesinya. Anggota tersebut mewujudkan pertanggung jawaban kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan

masyarakat umum dengan kewajiban tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesionalnya yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan kehati-hatian, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. *Internation Federation of Accountants*, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan.

2.2.4 Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan

Menurut Arens,*et.al* (2014 : 171) kekeliruan (*error*) adalah salah saji hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Ada dua contoh yang membahas tentang kekeliruan antara lain :

1. Adanya kesalahan pada perhitungan harga yang dihubungkan dengan kuantitas faktur penjualan, dan
2. Kesalahan pada bahan baku yang lama dalam menentukan nilai persediaan dengan metode yang terendah antaraharga perolehan atau harga pasar.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 312.2 dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011) memberikan definisi tentang kekeliruan (*Error*) berarti salah saji (*Misstatement*) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan mencakup hal-hal berikut ini :

1. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan;
2. Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta;

3. Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Para auditor menghabiskan waktu mereka untuk membuat dan melakukan perencanaan dalam proses audit. Perencanaan ini disiapkan untuk mendeteksi berbagai kesalahan yang sengaja maupun kekeliruan yang tidak disengaja oleh manajemen maupun oleh karyawan-karyawannya. Para auditor menemukan berbagai macam kekeliruan yang berasal dari berbagai jenis kesalahan yang dibuat dalam proses kalkulasi, penghapusan, kesalahpahaman, kesalahan penerapan standar-standar akuntansi, serta penggelapan dalam pengikhtisaran dan pemberian keterangan. (Agoes, 2012:71)

Menurut Madali (2016) Pengetahuan auditor dalam mendeteksi kekeliruan sangat diperlukan dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan. Auditor yang memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan akan lebih mudah menentukan pertimbangan tingkat materialitas karena pengetahuannya serta pengalaman dalam mengaudit membuat auditor lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pengungkapan kekeliruan sehingga dapat melaksanakan tugasnya terutama dalam pengungkapan kekeliruan sehingga dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.

Menurut Lestari dan I Made Karya (2013) Pengetahuan mendeteksi kekeliruan dapat diperoleh dari berbagai pelatihan formal maupun non formal. Pengetahuan auditor digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja. Pengetahuan mengenai kemungkinan kekeliruan oleh seorang auditor akan berguna untuk membuat *audit plan*. Auditor yang memiliki pengetahuan lebih mengenai kekeliruan akan menghasilkan pertimbangan tingkat materialitas yang akurat.

Menurut Natalisa (2017) menerangkan bahwa ada tiga indikator dalam menentukan pengetahuan mendeteksi kekeliruan, yaitu :

1. Pengalaman khusus dan pelatihan formal dapat dilakukan dengan adanya pengetahuan auditor. “tentunya seorang auditor sebelum bekerja sebagai auditor membutuhkan sebuah pelatihan dan pengalaman khusus dalam

mengaudit laporan keuangan agar seorang auditor dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi kekeliruan yang akan mengakibatkan kecurangan”.

2. Suatu kunci keefektifan kerja dapat diperoleh dari adanya pengalaman auditor. “sebuah pengalaman memang dibutuhkan dalam bekerja, maka dari itu seorang auditor yang memiliki pengalaman lebih akan lebih efektif dalam bekerja, tetapi pengalaman berlebih saja belum cukup untuk menjadi seorang auditor karena seorang auditor harus memiliki sifat kejujuran, independen, serta berintegritas dalam mengaudit laporan keuangan agar hal yang tidak diinginkan seperti kekeliruan bahkan kecurangan tidak terjadi dalam sebuah laporan keuangan”.
3. Memiliki banyak pengetahuan. “memiliki banyak pengetahuan saja belum cukup untuk menjadi seorang auditor, karena seorang auditor harus bekerja secara independen dan profesional dalam memegang kode etik atau etika profesi auditor agar tidak terjadi kekeliruan dan kecurangan yang sering terjadi seperti manipulasi laporan keuangan”.

2.2.5 Pertimbangan Tingkat Materialitas

Materialitas adalah besar salah saji yang sengaja dihilangkan dan salah saji itu mengandung informasi bagi pengguna laporan keuangan serta kemungkinan informasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari laporan keuangan (Ardianingsih, 2018:68).

Menurut Arens (2014:292-294), menyatakan materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketepatan laporan audit yang harus dikeluarkan. *FASB Concept Statement 2* mendefinisikan materialitas sebagai besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau berpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana.

Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupi, dapat mengakibatkan perubahan terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Mendefinisikan materialitas bahwa auditor harus mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. (Mulyadi, 2013:158)

Materialitas dapat ditetapkan pada tahap perencanaan audit yang tidak semena-semena menentukan bahwa kesalahan penyajian tidak dikoreksi, secara individual atau gabungan dibawah materialitas tersebut, akan selalu dievaluasi tidak material. Kondisi-kondisi yang berkaitan dengan beberapa kesalahan penyajian material walaupun kesalahan penyajian tersebut berada di bawah tingkat materialitas. (Agoes, 2018:212)

Menurut Arens (2014:294-295), menyatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi pendahuluan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu.

2.2.5.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi materialitas

Menurut Arens (2014:294-295), menyatakan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi pendahuluan auditor tentang materialitas untuk seperangkat laporan keuangan tertentu. Faktor-faktor yang terpenting adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kuantitatif yang mempengaruhi materialitas

a. Konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut

Salah saji dalam jumlah tertentu mungkin saja material bagi perusahaan kecil, tetapi dapat saja tidak material bagi perusahaan besar. Jadi, tidak mungkin menetapkan pedoman diterapkan pada semua klien audit.

b. Tolak Ukur yang Diperlukan untuk Mengevaluasi Materialitas

Materialitas bersifat relatif, diperlukan tolak ukur untuk menentukan apakah salah saji itu material. Laba bersih sebelum pajak sering kali menjadi tolak

ukur utama untuk menentukan berapa jumlah yang material bagi perusahaan yang berorientasi laba, karena jumlah ini dianggap sebagai item informasi yang penting bagi para pemakai.

Beberapa perusahaan menggunakan tolak ukur utama yang berbeda karena laba bersih sering kali berfluktuasi cukup besar dari satu tahun ke tahun lainnya, sehingga tidak memberikan tolak ukur yang stabil, atau bila entitas itu adalah organisasi nirlaba. Tolak ukur utama lainnya meliputi penjualan bersih, laba kotor, serta total aset atau aset bersih. Setelah auditing mengharuskan auditor mendokumentasikan dalam file audit dasar yang digunakan untuk menentukan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas.

2. Faktor-faktor Kualitatif yang juga Mempengaruhi Materialitas

Jenis salah saji mungkin lebih penting bagi para pemakai dibandingkan salah saji lainnya, sekalipun nilai dolarnya sama. Sebagai contoh :

- 1) Jumlah yang melibatkan kecurangan biasanya dianggap lebih penting ketimbang kesalahan yang tidak disengaja dengan nilai dolar yang sama, karena kecurangan itu mencerminkan kejujuran serta reliabilitas manajemen atau personil lain yang terlibat. Sebagai contoh, sebagian besar pemakai menganggap salah saji persediaan yang disengaja lebih penting ketimbang kesalahan klerikal dalam persediaan dengan nilai dolar yang sama.
- 2) Salah saji yang sebenarnya kecil bisa menjadi material jika ada konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Katakanlah bahwa modal kerja bersih yang tercantum dalam laporan keuangan hanya beberapa ratus dolar lebih tinggi dari nilai minimum yang disyaratkan dalam perjanjian pinjaman. Jika modal kerja bersih yang sebenarnya lebih kecil dari nilai minimum yang disyaratkan, yang menimbulkan *default* atas pinjaman itu, klasifikasi kewajiban lancar dan tidak lancar akan terpengaruh secara material
- 3) Salah saji yang sebenarnya tidak material dapat saja menjadi material jika mempengaruhi tren laba. Sebagai contoh, jika laba yang dilaporkan meningkat 3 persen per tahunnya selama 5 tahun terakhir tetapi laba tahun berjalan menurun 1 persen, perubahan tersebut mungkin material. Demikian

pula, salah saji yang akan menyebabkan kerugian dilaporkan sebagai laba juga harus mendapat perhatian auditor.

Menurut Christian (2012) dalam Natalisa (2017) pertimbangan tingkat materialitas dapat mempengaruhi keputusan para pemakai informasi. Menerangkan ada empat indikator dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas, yaitu :

1. Pertimbangan awal materialitas

Dalam melakukan perencanaan auditnya auditor harus melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas. Penentuan materialitas ini seringkali disebut dengan materialitas perencanaan, dapat berbeda dengan tingkat materialitas yang digunakan pada saat pengambilan kesimpulan audit dan dalam mengevaluasi temuan audit karena :

- a. Keadaan yang melingkupi berubah
 - b. Informasi tambahan tentang klien dapat diperoleh selama berlangsungnya audit.
2. Materialitas pada tingkat laporan keuangan Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
 - a. Auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit;
 - b. Pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit.
 3. Materialitas pada tingkat saldo akun

Meskipun auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, namun ia harus melakukan audit terhadap akun-akun secara individual dalam mengumpulkan bukti audit yang dipakai sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan audit. Oleh karena itu, taksiran materialitas yang dibuat pada tahap perencanaan audit harus dibagi ke akun-akun laporan keuangan secara individual yang akan diperiksa. Bagian materialitas yang dialokasikan ke akun-akun secara individual ini dikenal dengan sebutan salah saji yang dapat diterima (*tolerable misstatement*) untuk akun tertentu. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas

padatingkat saldo akun tidak boleh dicampur adukan dengan istilah saldo akun material.

4. Alokasi materialitas pada akun-akun

Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan dikuantifikasikan, penasiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Pengalokasian ini dapat dilakukan baik untuk akun neraca maupun akun laba rugi. Namun, karena hampir semua salah saji laporan laba rugi juga mempengaruhi neraca dan karena akun neraca lebih sedikit, banyak auditor yang melakukan alokasi atas dasar akun neraca. Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut. Contohnya, salah saji (*overstatement*) kemungkinan lebih besar terdapat dalam akun persediaan dibandingkan dengan aktiva tetap dan umumnya biaya untuk mengaudit persediaan lebih dibandingkan dengan biaya mengaudit aktiva tetap.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1 Pengaruh Profesionalisme terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Seorang profesional, harus menghindarkan terjadinya kebocoran serta sikap asal percaya, tetapi auditor tidak diharapkan untuk membuat suatu pertimbangan yang sempurna dalam setiap kesempatan dengan memperhatikan kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit. Auditor juga harus bertanggung jawab secara profesional dalam pelaksanaan tugasnya untuk bersikap tekun dan penuh kehati-hatian. Profesionalisme mempunyai makna yang berhubungan dengan profesi dan memerlukan kepercayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Amin Wijaya Tunggal, 2016:85).

Profesionalisme mengacu pada sikap atau mental dalam bentuk komitmen dari para anggota profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Oleh karena itu jika kepercayaan masyarakat sudah cukup memperhatikan bukti audit serta ketepatan laporan audit dengan membuat

pertimbangan yang sempurna atau sudah melengkapinya bukti audit tersebut, maka tidak terjadinya kebocoran dari seorang profesional.

Berdasarkan hasil penelitian Aprilla (2017), menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan seorang profesionalisme auditor memberikan keyakinan pada pemakai laporan keuangan atas kualitas audit yang telah dilakukan dengan menentukan ketepatan pertimbangan tingkat materialitas dalam laporan keuangan. Namun, menurut Utami(2014) profesionalisme auditor berpengaruh signifikan dan negatif pada pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor yang profesional tidak akan terlalu mudah dan murah dalam mengambil keputusan dalam memenuhi keinginan klien.

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme, secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

H₁ : Terdapat pengaruh profesionalisme terhadap pertimbangan tingkat materialitas

2.3.2 Pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Seorang auditor diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh IAPI, agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, sehingga dapat memberikan pendapat audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan (Agoes, 2012:42). Jika auditor tidak dapat menjunjung tinggi etika profesi yang sudah ditetapkan oleh IAPI, maka akan terjadinya kecurangan dalam memberikan suatu pendapat audit dan tidak sesuai dengan laporan keuangan yang telah disajikan.

Hasil penelitian Aprilla (2017) menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa dengan adanya etika profesi terhadap

pertimbangan tingkat materialitas auditor dapat memberikan pendapat audit yang sesuai dengan laporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami (2014) , bahwa etika profesi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, karena semakin rendah etika profesi pada seorang auditor maka semakin rendah kinerja audit yang dilakukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa petika profesi, secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

H₂ : Terdapat pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas

2.3.3 Pengaruh Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Seseorang yang memiliki suatu pengetahuan sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan tugasnya. Seorang auditor yang memiliki pengetahuan dalam mendeteksi kekeliruan yang baik, maka dalam melakukan pekerjaannya auditor akan lebih efektif. Auditor yang memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan akan lebih ahli dalam mengungkapkan kekeliruan . (Ardianingsih, 2018:35). Oleh karena itu seorang auditor harus mendeteksi kekeliruan yang telah ditelusuri baik yang tidak sengaja pada penyampaian laporan keuangan tersebut. Khususnya yang berhubungan dengan kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pengungkapan laporan keuangan, supaya tidak ada penyampaian atau pencatatan pada laporan keuangan yang fiktif.

Hasil penelitian Aprilla (2017), bernilai positif dan signifikan menunjukkan bahwa salah satu kunci keefektifan kerja seorang akuntan publik adalah pengetahuan, untuk membuat perencanaan audit yang efektif diperlukan pengetahuan tentang pola yang berhubungan dengan kekeliruan dalam laporan keuangan. Namun, menurut Natalisa (2017) tidak sejalan dengan variabel

pengetahuan mendeteksi kekeliruan. Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh negatif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sehingga, apabila semakin tinggi tingkat pengetahuan mendeteksi kekeliruannya maka akan semakin buruk pula seorang auditor menentukan pertimbangan tingkat materialitas pada saat melakukan audit suatu laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mendeteksi kekeliruan, secara parsial mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa variabel tersebut mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

H₃ : Terdapat pengaruh pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

2.3.4 Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi dan Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hal ini menunjukkan bahwa seorang auditor yang mempunyai pertimbangan tingkat materialitas sangat baik tentu auditor memahami semua prosedur audit yang semakin luas pengetahuan auditor yang dapat mendukung pertimbangan auditor dalam menentukan Tingkat Materialitas suatu laporan keuangan.

Terdapat keterkaitan antara masing-masing variabel dari penjelasan penelitian terdahulu yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa masing-masing variabel tersebut mempunyai pengaruh positif secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

H₄ : Terdapat pengaruh profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan secara simultan terhadap pertimbangan tingkat materialitas

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, gambaran menyeluruh penelitian ini yang menyangkut tentang pengaruh profesionalisme, etika profesi dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dapat disederhanakan dalam kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 2.1

